

Analisis buku teks Antropologi Kontekstual karangan Supriyanto dalam perspektif *Islamic worldview*

Endin Mujahidin¹ dan Abdul Rauf Haris^{2*}

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor

²Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak

* abdulrauf@wadimubarak.net

Abstrak

Artikel ini bertujuan membedah buku teks Antropologi Kontekstual dan menganalisisnya berdasarkan sudut pandang *Islamic worldview*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) dengan objek pustaka yang dikaji adalah buku teks pelajaran Antropologi Kontekstual yang disusun oleh Supriyanto, tahun 2009, dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Kajian *Islamic worldview* pada buku teks antropologi SMA menemukan bahwa buku teks tersebut mengandung nilai dan doktrin yang perlu diwaspadai karena mengandung pengetahuan (*knowledge*) yang bertentangan dengan bangunan worldview Islam. Buku teks ini mengandung unsur *worldview* yang mengandung muatan selular. Muatan selular ini diwakili oleh teori-teori antropologi yang dipaparkan dalam buku teks, yang berparadigma evolusionistis. Muatan buku teks antropologi meski tidak dapat dikatakan bertolak belakang dengan tujuan nasional, namun masih dinilai kurang menguatkan fungsinya sebagai media pengembangan pengetahuan sekaligus peningkatan iman dan takwa peserta didik.

Kata kunci: antropologi, evolusi, worldview.

I. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan modern dipandang sarat dengan *worldview* Barat yang banyak bertentangan dengan *worldview* Islam. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan ilmu pengetahuan Barat yang positivistik di mana kebenaran didasarkan kepada dua sumber, yaitu rasio dan empiris. Meski penekanannya berbeda-beda, sifat materialisme merupakan syarat ilmiah yang sudah tidak lagi diperdebatkan dalam setiap paradigma (Muslih, Zahri, & Surgana, 2004).

Menurut al-Attas, dikotomi merupakan gejala sekularisasi yang muncul dari *worldview* di Barat, khususnya dari tradisi Yahudi, yang mengagungkan semangat zaman (al-Attas, 2011). Sekularisme dapat dibahasakan sebagai paham kedisini-kinian.

Diserahkan: 20 April 2019 **Disetujui:** 29 April 2019 **Dipublikasikan:** 30 April 2019

Kutipan: Haris, A., & Mujahidin, E. (2019). Analisis buku teks Antropologi Kontekstual karangan Supriyanto dalam perspektif *Islamic worldview*. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 98-113. doi:<http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v8i1.1877>

Sekularisme tidak lagi mengaitkan *worldview* tentang masa lalu sebelum manusia lahir dan masa depan setelah manusia mati. Semangat zaman yang dimiliki masyarakat Yahudi di Barat membentuk perkembangan ilmu pengetahuan yang hanya mengakui pada hal-hal yang aktual, sekarang dan dapat diketahui (empiris). Lambat laun, agama sebagai sumber pengetahuan tak lagi diakui sebagai sumber kebenaran (epistemologi) dalam bangunan ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat dewasa ini (al-Attas, 2001).

Gejala sekularisme ini menemukan momentumnya terutama ketika munculnya paham heliosentris yang terkenal oleh Copernicus maupun Galileo, yang bertentangan dengan paham geosentris yang kala itu dijustifikasi oleh Kristen sebagai agama besar di Barat. Bagi Kuhn, pergeseran paradigma dari geosentris menjadi heliosentris melahirkan sifat revolusioner bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, juga pada perubahan revolusioner masyarakat (Kuhn, 2008). Munculnya paham heliosentris melahirkan cara pandang revolusioner masyarakat Barat terhadap agama dan institusinya, dalam hal ini Agama Kristen dan gereja.

Dalam perspektif lain, Al-Attas menjelaskan bahwa gejala sekularisme memiliki akar kultural masyarakat Barat yang hidup berdasarkan filsafat, bukan agama. Rasio dan empiris menjadi dasar utama dalam sistem pengetahuan yang ada pada masyarakat Barat (al-Attas, 2001). Dengan demikian, mereka tidak menitikberatkan pada keyakinan-keyakinan mengenai Tuhan, akhirat, kenabian, wahyu dan lain-lain yang ada pada agama. Berkembangnya agama Kristen di Barat tidak mampu mengatasi nilai kultural rasionalis-empiris yang mengakar di Barat. Kegagalan ini melahirkan suatu sikap keberagamaan yang problematik di mana agama, meski dianut, tidak diakui sebagai sumber kebenaran dalam memandang hidup dan kehidupan.

Seperti al-Attas, Ismail al-Faruqi seorang ahli filsafat Barat berdarah Palestina, ikut mengkritisi perkembangan ilmu pengetahuan Barat. Menurutnya, secara tidak langsung sekularisme juga merambah pada masyarakat Islam. Bukan hanya itu, masyarakat Islam juga telah menjadi korban westernisme yang mengakibatkan munculnya rasa rendah diri dengan meniru begitu saja kebudayaan-kebudayaan asing. Sikap ikut-ikutan ini menimbulkan demoralisasi dan deIslamisasi terhadap lapisan masyarakat muslim (al-Faruqi, 1984). DeIslamisasi sendiri menurut al-Attas adalah penyerapan konsep-konsep asing ke dalam pikiran umat Islam, yang kemudian menetap dan memengaruhi pemikiran serta penalaran mereka (al-Attas, 2011).

Selain masalah westernisasi, persoalan umat Islam juga adalah meluasnya kebodohan, berkembang buta huruf, dan takhayul, yang menjadikan umat Islam lari kepada keyakinan buta, bersandar kepada literalisme dan legalisme atau berserah diri saja pada pemimpin atau tokoh-tokoh mereka.

Menurut al-Faruqi, westernisasi masuk juga ke wilayah dan persoalan akademik. Tidak sedikit generasi muslim yang belajar di Barat pada akhirnya berperan dalam

memperkuat westernisasi dan sekularisasi di lingkungan perguruan akademik (al-Faruqi, 1984).

Baik al-Attas maupun al-Faruqi sama-sama memandang bahwa jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan umat Islam dari keterpurukan dan keluar dari hegemoni pengetahuan Barat yang sekuler adalah melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan. Al-Attas dan al-Faruqi tidak memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang bebas nilai (*value free*), tetapi sarat muatan ideologis (*value laden*). Langkah yang harus ditempuh dalam masalah ini adalah dengan mengubah *worldview* Barat sekuler yang terkandung dalam ilmu pengetahuan Barat. Umat Islam harus membebaskan diri dari tradisi-tradisi magis, mitologi, animisme, dan segala bentuk paham kebangsaan dan kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Perlu dilakukan pengislaman ilmu pengetahuan atau yang lebih dikenal dengan Islamisasi.

Kegiatan pendidikan sebagai proses transformasi sosial mengandung ideologi tertentu dalam muatan kurikulumnya. Penemukenalan ideologi ini bisa diketahui dengan cara mencari tahu pandangan-*worldview* yang terkandung dalam kurikulum, melalui muatan materi pelajaran yang hendak disampaikan. Mata pelajaran dengan demikian tidak bisa dianggap netral dan murni ilmiah tanpa bersifat ideologis. Materi-materi dalam pelajaran mengandung nilai-nilai tertentu yang dirancang untuk membangun cara pikir dan sikap tertentu pada peserta didik. Permasalahan nilai ini menjadi hal yang menjadi perhatian bagi kelompok atau penguasa yang berkepentingan menyosialisasikannya.

Begitu pentingnya muatan nilai dalam materi pelajaran membuat masyarakat sangat berhati-hati. Belum lama ini kalangan pendidikan dihebohkan dengan temuan Lembar Kerja Siswa (LKS) mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berisi pertanyaan , “Indonesia mengembangkan sendiri ideologi yang dinilai tepat dengan kondisi bangsa Indonesia yang dinamakan?” Ironisnya, dalam buku pegangan guru jawabannya adalah komunis bukan Pancasila. Meski dijawab pihak penerbit sebagai kesalahan teknis, jawaban “komunis” tertukar untuk jawaban soal di bawahnya, banyak kalangan menyayangkan kejadian ini. Beberapa pihak bahkan memandangnya sebagai unsur kesengajaan untuk tujuan ideologis tertentu.

Sifat ideologis buku teks pelajaran diakui oleh Dewi Turgarini, dalam laman Fakultas Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Dewi mencontohkan dengan buku teks pelajaran sejarah. Mulanya, buku teks sejarah ditulis oleh pihak kolonial dengan cara pandang dan ideologi yang pro-kolonial (*Nederlandosentris*), sebelum nantinya menjadi “indonesiasentris”. Selanjutnya, ketika awal kemerdekaan pun, perubahan isi buku teks pelajaran sejarah sangat dipengaruhi ideologi dan sikap kekuasaan yang berlaku saat itu. Pada masa Orde Lama, misalnya, kurikulum 1964 dinilai mengandung muatan sosialisme, ideologi yang kala itu bersaing di tingkat kekuasaan.

Coraknya kemudian berbeda ketika dibandingkan dengan masa Orde Baru yang bertujuan menanamkan ideologi Pancasila (Turgarini, 2012).

Masih tentang buku teks pelajaran sejarah, Tiar Anwar Bahtiar menilai tidak ada yang netral dalam penulisan sejarah, termasuk dalam buku teks pelajaran sejarah. Tidak ada buku teks yang bersifat 'saintifik' murni, secara independen terlepas dari kepentingan dan nilai ideologis tertentu. Ini bisa ditunjukkan dengan berubah-ubahnya misi pengajaran sejarah dalam perkembangan di Indonesia. Perubahan ini sangat dipengaruhi perubahan politik. Dengan demikian, cukup beralasan dan penting untuk menanamkan tata nilai Islam dalam buku teks pelajaran sejarah.

Secara umum antropologi adalah ilmu yang mengkaji manusia dan kebudayaannya. Kebudayaan sebagai konsep pokok dalam antropologi memiliki pengertian yang luas meliputi banyak unsur kehidupan manusia: bahasa, sistem gagasan dan pengetahuan, peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem kepercayaan, teknologi dan kesenian. Definisi ini termasuk klasik, merupakan definisi yang dikemukakan oleh tokoh antropologi klasik, Clyde Kluckhohn. Definisi ini meski tidak selalu dianggap operasional, tetapi secara umum merangkul banyak definisi mengenai kebudayaan.

Dengan berupaya mengaitkan unsur budaya secara holistik, antropologi sosial menaruh perhatian tertentu berkaitan dengan bidang disiplin ilmu politik, ekonomi, geografi manusia, agronomi bahkan filsafat dan teologi dan lain-lainnya. Antropologi menempatkan disiplin-disiplin ilmu ini sebagai bagian dari kebudayaan, dan mencari pemahaman (*verstehen*) bagaimana adat-istiadat, institusi sosial, nilai-nilai dan cara-cara persoalan dari setiap unsur budaya tersebut berhubungan. Untuk tujuan kajiannya ini, yakni pemahaman yang holistik, antropologi sosial melakukan investigasi atau penelitian dalam konteks kontemporer dan skala kecil (*small scale*). Perbedaan antropologi dengan disiplin lain adalah bahwa antropologi membawa pandangan integratif, penyatuan untuk membahas kondisi manusia (Saifuddin, 2005).

Antropologi sebagai disiplin ilmu selalu memperoleh sorotan terutama menyangkut salah satu teorinya berkaitan dengan sejarah manusia. Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusinya memberikan kejutan pada banyak pihak, terutama pihak agamawan berkenaan dengan teori evolusinya.

Teori evolusi Darwin menjelaskan bahwa kehidupan adalah hasil peristiwa tidak sengaja dan tanpa tujuan yang terjadi akibat peristiwa alam dan suatu spesies berasal dari nenek moyang yang sama melalui proses evolusi yang terjadi secara kebetulan (Yunus, Haryanto, & Abadi, 2006).

Pandangan ini bertentangan dengan ajaran agama, terutama Islam yang meyakini bahwa manusia diciptakan (kreasionisme) dan untuk tugas dan tujuan tertentu. Darwin juga menyimpulkan bahwa manusia berleluhur kera. Dalam pengajaran di sekolah, teori

yang sarat dengan materialisme ini bisa menimbulkan pola pikir yang keliru. Ini bisa memengaruhi penalaran dan keyakinan peserta didik. Dalam pertimbangan pendidikan Islam, paham ini bertentangan dengan konsep Islam tentang hakikat manusia yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam, sebagaimana dirumuskan dalam seminar pendidikan Islam sedunia tahun 1980 di Islamabad, sebagai berikut:

Education aims at the balanced growth of total personality of man through the training of man's spirit, intellect, the rational self, feeling and bodily sense. Education should, therefor, cater for the growth of man in all its aspects, spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both individually and collectively, and motivate all these aspects toward goodness and attainment of perfection. The ultimate aim of education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual, the community and humanity at large (Arifin & Syafi'i, 2003).

Dalam rumusan ini tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang tunduk patuh terhadap aturan dan ketentuan Allah SWT. Dalam Islam, hakikat manusia adalah manusia yang diciptakan dengan tugas dan tujuan sebagai *khalifatu fil ardh* dan sebagai *'abid* atau hamba (Manti, Husaini, Mujahidin, & Hafidhuddin, 2016).

Masalah teori evolusi hanya salah satu dari pandangan keliru dalam studi antropologi yang mungkin disusun/disajikan secara kurang tepat dalam buku pelajaran antropologi SMA. Antropologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya membahas banyak hal berkaitan dengan nilai-nilai dan cara pandang tertentu tentang manusia dan budaya/masyarakatnya. Dikaitkan pada pemahaman bahwa ilmu pengetahuan mengandung *worldview* tertentu, dan bahwa melalui pendidikan pandangan tersebut diorganisasi untuk membangun nilai dan sikap tertentu, maka mengkaji *worldview* yang ada pada buku teks pelajaran antropologi SMA merupakan sikap waspada yang perlu dilakukan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yakni penelitian dengan menggunakan pustaka tertentu sebagai obyek kajian (Surahman, Husaini, Mujahidin, & Saefuddin, 2014). Dalam penelitian ini, objek pustaka yang dikaji adalah buku teks pelajaran Antropologi Kontekstual yang disusun oleh Supriyanto, tahun 2009, dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Penelitian terhadap buku teks ini dilakukan melalui tiga tahap (Harahap, 2000). Pertama, inventarisasi. Inventarisasi terhadap buku teks dilakukan dengan menemukenali setiap materi pelajaran. Kedua, seleksi. Materi-materi pelajaran yang telah dikumpulkan diseleksi menggunakan teori *Islamic worldview* untuk menemukenali materi-materi yang berkaitan dengan teori tersebut. Dan ketiga, materi yang telah diseleksi dianalisis berdasarkan karakteristik *worldview* menurut teori *Islamic worldview*.

III. Analisis Buku Teks Antropologi Kontekstual

A. Etnosentrisme

Manusia secara fitrah hidup berkelompok dan membangun sebuah kelompok sosial yang memiliki identitas berbeda dengan kelompok lainnya. Buku teks membahas perbedaan ini dalam pembahasan tentang keragaman suku bangsa yang dengan kaya dimiliki Bangsa Indonesia. Secara umum, penjelasan buku teks tentang realitas keragaman berkisar pada penjelasan tentang konsep keragaman Indonesia dan definisinya, realitas keragaman Indonesia dan pedoman menyikapi keragaman tersebut.

Kesadaran terhadap keragaman yang dibangun melalui buku teks adalah keragaman tentang perbedaan suku bangsa dan kebudayaannya. Kecenderungan untuk membedakan masyarakat berdasarkan pengelompokan etnik ini memang merupakan kecenderungan dalam kajian yang dikembangkan dalam ilmu pengetahuan sosial di Barat. Pengelompokan berdasarkan etnik ini muncul sebagai respons dari kolonialisme yang berkembang di dunia Eropa, yang sekaligus merupakan latar sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di Barat, termasuk ilmu sosial. Khusus untuk antropologi, kenyataan ini disadari betul dengan adanya pengakuan antropologi sebagai *bastard child of colonialism*, kolonialisme adalah ibu kandung antropologi. Ini dikaitkan dengan permulaan munculnya kajian awal antropologi berupa etnografi masyarakat suku bangsa daerah jajahan untuk kepentingan kolonialisme.

Dalam beberapa penjelasan, buku teks menggiring kesadaran tentang perbedaan berdasarkan etnik, dibandingkan unsur sosial lainnya. Meski menjelaskan bahwa banyak hal yang mendorong kesadaran berkelompok seseorang seperti agama, bahasa, ras dan lain-lainnya, kesadaran keragaman yang dibangun dalam materi buku teks adalah kesadaran berkelompok berdasarkan etnik. Pandangan etnosentris ini memang menjadi ciri khas pemikiran antropologi dalam memandang realitas sosial. Dalam buku teks, pandangan ini misalnya ada penjelasan bahwa kesadaran suku bangsa merupakan pemicu konflik utama karena melalui identitas etnik inilah seseorang membangun kekuatan sosial yang tidak dapat ditawar ataupun dibendung (Supriyanto, 2009).

Penekanan terhadap keragaman etnik tampaknya tak terhindarkan jika dikaitkan pada upaya membangun kesadaran berbangsa. Dalam hal ini, misalnya, buku teks menjelaskan bahwa perbedaan etnik perlu dikembangkan menjadi sebuah ideologi yang mampu mempersatukan dalam sebuah gagasan yang dinamakan kebudayaan nasional. Jika dikaitkan pada penjelasan bahwa etnik dipandang sebagai kategori sosial yang penting dalam keragaman masyarakat dan merupakan unsur primordial yang mendorong suatu integrasi, terbayang betapa sulitnya membangun kesadaran kelompok (integrasi) berdasarkan perbedaan yang dibatasi dengan teritorial, nilai dan sistem

interaksi tertentu. Pertanyaannya, apakah tidak ada kategorisasi sosial lain sebagai pemersatu yang lebih luas cakupannya tanpa dibatasi teritorial sebuah masyarakat dan batasan-batasan nilai lokaliknya? Tentu saja ada, yaitu agama.

Agama, dalam masyarakat, bukan hanya bagian dari kebudayaan yang ikut membentuk sistem sosial budaya suatu masyarakat bersamaan unsur budaya lainnya seperti sistem politik, mata pencaharian dan lain-lain. Lebih dari itu, agama sebagai sumber nilai sebuah masyarakat merupakan pengaruh terbesar kebudayaan dan unsur-unsurnya. Melalui agamalah, sistem ekonomi masyarakat merumuskan aturan main dan nilai etikanya. Begitu juga politik, bahasa dan unsur-unsur lainnya.

Melalui agama, dalam hal ini agama Islam, segala aspek perikehidupan manusia diatur dan memperoleh seperangkat nilai dan aturan yang pada akhirnya membangun sistem sosial yang dinamakan kebudayaan. Hal ini hanya bisa terjadi jika kesadaran keagamaan sebagai aspek pemersatu dan sumber nilai dibangun dan diakui dalam masyarakat. Sayangnya, potensi integratif yang mungkin dicapai melalui agama tidak dipandang ampuh dan strategis dalam urusan kebangsaan. Alih-alih, agama berdasarkan penjelasan buku teks dilihat sebagai faktor yang lebih memperuncing konflik yang ditimbulkan karena perbedaan etnik. Hambatan integrasi semakin tampak jika diferensiasi sosial berdasarkan suku bangsa ini bersinggungan dengan ukuran lain seperti agama, kelas ekonomi dan Bahasa (Supriyanto, 2009).

Pengakuan keragaman etnik dan potensi disintegrasi dimilikinya diikuti dengan cita-cita membangun rumusan budaya yang mampu merangkum keragaman budaya etnik menjadi kebudayaan nasional. Buku teks tidak menjelaskan secara lebih konkret tentang kebudayaan yang dinilai mampu merangkul dan mempertemukan keragaman etnik dalam kesamaan nilai dan norma. Pada kenyataannya, merumuskan budaya yang bermakna universal bagi setiap kelompok etnik yang begitu banyak tidak pernah sepi dari perubahan dan konsensus.

Berbeda dengan fungsi integratif yang dimiliki Islam. Membangun kesadaran agama sebagai faktor pemersatu berarti mengakui prinsip universalitas dalam Islam. Prinsip ini, sebagai dijelaskan al-Faruqi, menjadikan Islam sebagai sumber tata nilai dalam dunia sosial (negara) yang berlaku sama bagi setiap individu dan masyarakat dalam kelompok kebudayaan mana pun. Prinsip universalisme ini merupakan prinsip dalam konsep umat dalam Islam yang menolak partikularisme dalam pengertian penerapan tata sosial utama yang lokalik dan terpecah berdasarkan daerah, bangsa atau etnis.

Dalam pengantar buku *Ke Arah Antropologi Islam*, al-Faruqi menuliskan pandangannya tentang pandangan etnosentris dalam antropologi yang bertentangan dengan konsep umat dalam Islam,

Antropologi Barat telah lama diracuni oleh pandangan realitas etnosentris. Ia sulit sekali mendefinisikan manusia, kecuali berdasarkan ciri-ciri etnik. Sementara

etnisitas itu sendiri dijadikan sebagai sesuatu yang amat suci dan tidak dapat diganggu gugat, sebagai realitas akhir yang menentukan apa dan bagaimana... etnisitas tidak perlu berubah menjadi etnosentrisme di mana semua nilai harus tunduk kepadanya sebagai prinsip akhir manusia dan etika. Inilah bahaya relativisme budaya di mana sebagian besar antropolog telah jatuh dan akan terus jatuh dewasa ini (Ahmed, 1994).

Dalam buku teks, pandangan etnosentrisme secara terang-terangan diakui sebagai sifat dan wawasan yang perlu dikembangkan untuk membangun kesadaran nasionalisme dan patriotisme bangsa. Meski mendefinisikan etnosentrisme sebagai suatu pandangan yang menyebutkan bahwa kelompoknya adalah pusat segalanya dan semua kelompok yang lain dibandingkan dan dinilai sesuai dengan standar kelompoknya, buku teks melihat pandangan ini bermanfaat.

Etnosentrisme merupakan pengembangan sifat yang mampu meningkatkan nasionalisme dan patriotisme suatu bangsa tertentu. Tanpa etnosentrisme maka kesadaran nasional untuk mempertahankan suatu bangsa dan meningkatkan integrasi bangsa akan sulit dicapai (Supriyanto, 2009).

Pandangan etnosentris dalam antropologi cukup kental dalam sejarah kemunculannya sebagai disiplin ilmu. Cikal bakal antropologi sebagai ilmu pengetahuan adalah bahan-bahan berupa laporan, karangan dan buku hasil tulisan orang-orang Eropa tentang bangsa-bangsa di luar Eropa. Bahan-bahan antropologi ini awal ini biasanya bersifat dangkal, kurang teliti dan kebanyakan mengkhhususkan kepada unsur-unsur kebudayaan serta adat-istiadat bangsa-bangsa Afrika, Asia, Oseania dan penduduk pribumi Amerika yang dalam mata mereka tampak aneh saja (Koentjaraningrat, 1987).

Bahan-bahan serupa dengan kualitas lebih baik bisa ditemukan dalam ilmuwan Islam sebelum kebangkitan Eropa seperti Abdul Rachman Ibnu Khaldun (Abad ke 14) lewat karyanya berjudul *Mukadimah* dan al Biruni karyanya *Kitab al Hind*. Seorang ahli sejarah Inggris bernama A. Toynbee mengomentari karya Ibnu Khaldun "*a philosophy of history which is undoubtedly the greatest work of its kind that has ever yet been created by any mind in any time or place*" (Koentjaraningrat, 1987). Sementara al Biruni, diakui oleh beberapa antropologi sebagai Bapak Antropologi dan Antropolog pertama melalui *Kitab al Hind*-nya. "Jika antropologi adalah sebuah ilmu yang didasarkan atas observasi partisipasi yang luas tentang kebudayaan lain, menggunakan data yang terkumpul, dengan kenetralan nilai, analisa yang tenang (tidak memihak), menggunakan metode komparatif, maka sesungguhnya al Biruni adalah patokan tertinggi" (Ahmed, 1994).

Kembali ke bahan-bahan awal dari Barat, beberapa karya bisa disebutkan seperti *Summa Oriental* (1512) karya seorang pedagang Portugis bernama Tomes Pires yang menulis tentang kisah-kisah perjalanan para pelaut dan musafir bangsa Eropa, buku harian Antonio Pigafetta yang mencatat keterangan-keterangan mengenai penduduk pantai pulau-pulau Alor, Timor dan beberapa pulau lain di Indonesia Timur dalam tahun

1521, laporan-laporan pendeta peniar agama Nasrani sejak abad ke 13 seperti J.F. Lafitau, seorang peniar agama Katolik bangsa Prancis yang bekerja menyiarkan agama bertahun-tahun lamanya di suku-suku bangsa Indian Iriquois di Kanada Timur. Bukunya berjudul *Moeurs des Sauvages Americains Comparees aux Moeurs Premiers Temps* (1724) tidak hanya merupakan deskripsi tentang adat istiadat (*moeurs*) dari orang-orang Indian, juga mengandung analisa perbandingan dari beragam unsur adat-istiadat dengan unsur yang serupa dalam peradaban Yunani dan Rum Klasik (Koentjaraningrat, 1987).

Kajian-kajian kesukubangsaan dan corak “primitif”-nya oleh orang-orang Eropa sempat membatasi antropologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat-masyarakat sederhana dan keunikan-keunikan adat istiadatnya. Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi, pendekatan antropologi dalam memahami dan mendeskripsikan suatu masyarakat juga akhirnya dipakai dalam mengkaji masyarakat yang lebih kompleks. Apalagi, masyarakat sederhana dalam definisi beberapa abad dulu semakin sulit ditemukan dalam masyarakat modern.

Pun begitu, ada beberapa hal yang tidak hilang dalam tradisi kajian antropologi yaitu kajian deskriptif tentang budaya atau masyarakat tertentu yang diperoleh melalui pengamatan mendalam dan partisipatif. Tradisi terlibat secara partisipatif ini warisan dari penyusunan bahan-bahan awal yang berisi gambaran masyarakat atau etnis yang akhirnya dikembangkan menjadi metodologi khas antropologi yang disebut etnografi. Ciri khas etnografi adalah sifatnya yang holistik-integratif, *thick description* dan analisa kualitatif dalam rangka memperoleh *native's point of view* (Spradley, 1997).

Catatan-catatan etnografi tentang suku bangsa yang semakin dipandang bermanfaat seiring berkembangnya upaya kolonialisme. Usaha kolonial dalam memanfaatkan kajian awal antropologi ini membuat antropologi dipandang sebagai produk kolonialisme. Dalam kolonialisme di Indonesia, catatan-catatan etnografi yang dibuat oleh Snouck Hurgronje menjadi contoh tentang manfaat studi antropologi dalam praktik penjajahan. Antropologi telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik kolonialisme di awal abad 19. Ahli antropologi Belanda yang merupakan pegawai kolonial Belanda yang bertugas di Buru, Maluku, menulis karangan-karangan tentang evolusi perkawinan dan keluarga berjudul *Over de Primitieve Vormen van het Huwelijk en de Oorsprong van het Gezin* (1880-1881) (Koentjaraningrat, 1987). Ekspedisi Bonaparte ke Mesir, melibatkan 15 ilmuwan, termasuk ahli-ahli etnografi di dalamnya (Ahmed, 1994).

Tulisan-tulisan etnografi yang dibuat oleh Barat memberikan gambaran tentang orang Timur dalam kaca mata Barat. Tidak jarang gambaran ini penuh subjektivitas dan kurang ajar. Mereka menggambarkan Timur sebagai tidak rasional, merusak akhlak, kekanak-kekanakan dan berbeda. Di kutub lain, Barat atau bangsa Eropa adalah rasional, matang dan normal. W Robertson dari Universitas Edinburgh dalam buku berjudul

History of America (1777) menilai bangsa-bangsa luar Eropa sebagai “*an infancy of sosial life*”, sebagai contoh umat manusia yang berada pada tingkat awal kebudayaan manusia.

Contoh baik mengenai etnosentris dan Eropasentris di kalangan antropolog awal bisa kita lihat dari Sir James Frazer. Ahli *folklore* Inggris yang menulis berjilid-jilid buku tentang adat-istiadat suku primitif, ketika ditanya apakah dia pernah bertemu langsung dengan masyarakat yang dituliskannya, dia menjawab, “Semoga Tuhan melindungi saya” (Ahmed, 1994).

Setelah catatan etnografi banyak dan terus mengalami peningkatan dalam kualitasnya, kebutuhan praktisnya mulai dirasakan. Pemerintah kolonial dan misionaris mulai menyadari adanya manfaat dan keuntungan yang diperoleh melalui karya etnografi dan penelitiannya dalam upaya penjajahan dan penyebaran agama Kristen. Mulailah dikembangkan satu ilmu dan sistematika yang dilakukan melalui studi lapangan. Yang sebelumnya hanya dilakukan oleh para ilmuan, kolonial dan misionaris mulai menggunakan jasa antropolog atau menerapkan pendekatan antropologi dalam upaya memahami masyarakat yang didatanginya. Beberapa contohnya adalah Franz Boaz yang mengkaji masyarakat Eskimo, tim Ekspedisi Torres Strait yang dipimpin oleh A.C. Hadon yang bertugas melakukan survei lapangan yang komprehensif di wilayah Melanesia, dan Bronislaw Malinowski yang mengkaji masyarakat di kepulauan Trobriand, Pacific Barat semasa Perang Dunia I.

B. Relativisme Kebudayaan

Dalam integrasi, penekanan etnisitas berupaya membangun konsensus yang mungkin disepakati dan mampu merangkul segala perbedaan etnik. Mungkinkah? Dalam pandangan relativisme kebudayaan mungkin saja, sebagaimana dijelaskan dalam buku teks. Semua kebudayaan memerlukan pengakuan dan harus diberi ruang yang sama. Negara wajib memberikan penghargaan dan eksistensi bagi semua kebudayaan yang berkembang di Indonesia (Supriyanto, 2009).

Menurut buku teks, mengamini pendapat Clifford Geertz, solusi paling tepat bagi realitas keagamaan Indonesia yang plural adalah relativisme kebudayaan karena dianggap mampu membangun sikap arif dan bijak melihat perbedaan kebudayaan (Supriyanto, 2009).

Berikut adalah penalaran yang dibangun dalam buku teks dalam menjelaskan dasar pemikiran relativisme kebudayaan. Pertama, tidak ada kriteria untuk menentukan tinggi rendahnya, maju dan mundurnya suatu budaya. Kedua, semua budaya sama baik dan luhurnya, sama hebat dan sama agungnya. Ketiga, selama memiliki fungsi dalam sistem kebudayaannya, suatu kebiasaan yang tampak buruk dan merugikan tidak bisa dipandang buruk. Keempat, jangan menilai suatu kebudayaan menggunakan kebudayaan lain. Meski dianggap buruk oleh kebudayaan lain, suatu bagian (unsur) budaya selama serasi dengan unsur lainnya dalam sebuah kebudayaan, adalah dipandang baik.

Pandangan Geertz tentang relativisme kebudayaan disebut sebagai kesadaran terhadap realitas pola kehidupan keagamaan yang plural, yang ada di Indonesia. Penalaran tentang relativisme kebudayaan ini, dengan demikian, harus mampu menjawab persoalan pluralitas keagamaan di Indonesia. Bagaimana penalaran relativisme tadi mengatasi persoalan ragam kehidupan keagamaan di Indonesia sama sekali tidak dijelaskan dalam buku teks. Alih-alih begitu, buku teks malah memberikan contoh yang tidak berkaitan sama sekali dengan pluralitas keagamaan.

Contoh yang diberikan buku teks adalah kebiasaan berpakaian tebal bagi orang Eskimo serta tradisi lompat batu di Nias sebagai inisiasi dan tolok ukur kedewasaan. Bagian mana yang mampu menjelaskan pengertian keragaman etnik/budaya dan kehidupan agama yang dipandang sarat potensi konflik? Sejauh mana pandangan relativisme kebudayaan bisa menjawab realitas keragaman ini?

Jika yang ingin disampaikan oleh buku teks adalah perbedaan definisi atau batas berpakaian yang pantas, yang berbeda dalam setiap kebudayaan dan agama, maka contoh pakaian orang Eskimo jauh dari memadai untuk bisa menjelaskan persoalan keragaman ini. Lebih dari itu, pun jika yang digunakan adalah masalah kepantasan dalam pakaian, maka ini mengantarkan pada persoalan mendasar yang harus dijawab relativisme kebudayaan. Sampai batas mana ukuran nilai dan norma dalam berpakaian ditentukan? Atau masih mungkinkah batas-batas ini dibuat dalam pandangan relativisme kebudayaan?

Buku teks beberapa kali mengembalikan pertanyaan ini pada perlunya mengembangkan sebuah rumusan kebudayaan nasional yang wajib menjadi acuan semua kebudayaan. Bagaimana mempertemukan banyak nilai yang tidak jarang saling bertentangan ini? Relativisme kebudayaan tidak menunjukkan satu contoh pun. Persoalan lain yang lebih mendasar adalah, melalui upaya merumuskan kebudayaan nasional, relativisme kebudayaan pada akhirnya melanggar keyakinannya sendiri dengan merumuskan sebuah nilai yang tidak boleh lagi dipandang relatif.

Relativisme kebudayaan seperti dalam posisi gamang ketika menghadapi realitas keragaman dan potensi konflik yang dimilikinya. Di satu sisi pandangan ini menarik diri dari realitas plural yang dihadapinya dengan menerima apa pun bentuk perbedaan. Namun setelah semua perbedaan itu berkumpul, barulah terjun dalam keragaman dengan berupaya mencari persamaan yang tidak lagi bersifat relatif. Pandangan ini kemudian menjadi tak berdaya ketika menemukan banyak keragaman yang tidak dapat dipertemukan bahkan berpotensi konflik. Di sinilah pandangan relativisme kebudayaan bersifat naif seolah perbedaan-perbedaan itu tidak akan berbenturan dan saling berseberangan, seolah-olah masing-masing kebudayaan berinteraksi di dalam sebuah arena kebudayaan tertutup. Di zaman sekarang, susah sekali menemukan suatu masyarakat kebudayaan yang hidup tertutup dan luput dari pengaruh luar.

C. Ideologi Multikulturalisme

Multikulturalisme muncul sebagai respons terhadap persoalan minoritas kultural pada sebuah negara yang kerap mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Persoalan diskriminasi ini muncul dari pengalaman dunia Barat menghadapi keragaman kelompok etnik dan kelompok sosial yang dieksklusi dan dimarginalisasi semata-mata karena keberlainan mereka. Dengan demikian, perhatian utama multikulturalisme adalah masalah keadilan (Hardiman, 2011). Keadilan ini diwujudkan dengan membangun kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum dan menjunjung kesamaan hak-hak individu.

Diskursus multikulturalisme di antaranya muncul sebagai respons persoalan minoritas kultural dalam konteks Kanada dan USA (Hardiman, 2011). Minoritas etnik seperti kaum Afro-Amerika, Asia-Amerika, Indian, Feminis, menuntut untuk mendapatkan hak mereka dalam ikut menentukan pengambilan keputusan publik seperti kebijakan sosial dan kurikulum pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi. Hak seperti ini sebetulnya dimiliki oleh semua orang (kelompok) sebagai hak warganegara. Namun yang dituntut oleh multikulturalisme lebih dari ini. Melalui istilah *politics of recognition*, multikulturalisme menuntut hak untuk menentukan diri sebagai anggota sebuah kelompok minoritas atau tuntutan pengakuan atas identitas kolektif, kepentingan kelompok dan orientasi nilai ataupun *weltanschauung* kelompok (Hardiman, 2011).

Tuntutan akan pengakuan kultural muncul karena dalam hak kewarganegaraan tidak mengenal diferensiasi kultural. Misalnya, di mata hukum, setiap warga negara dipandang dan diperlakukan sama tanpa melihat latar belakang kulturalnya. Sementara dalam multikulturalisme, persoalan kultural dimunculkan untuk memperoleh pengakuan dengan dua cara yakni memperoleh respek atas identitas-identitas unik individu tanpa memandang gender, ras atau etnisitas, dan kedua, respek atas kegiatan-kegiatan, praktik-praktik dan cara-cara memandang dunia yang khususnya dinilai oleh, atau dihubungkan dengan para anggota kelompok-kelompok yang dirugikan, yakni minoritas-minoritas etnis dan agama, termasuk perempuan dan kaum penyandang cacat (Hardiman, 2011).

Menurut Kymlicka, seperti dikutip F. Budi Hardiman, multikulturalisme adalah politik tentang hak-hak minoritas. Biasanya subyek dalam persoalan hak adalah individu. Dalam multikulturalisme, subyek dari teori-teori tentang hak berasal dari subyek kolektif atau kolektif. Dalam rumusan Kymlicka, tiga macam subyek kolektif yang mendapat perhatian politik multikulturalisme terdiri dari tiga jenis. Pertama, gerakan-gerakan sosial baru meliputi gerakan kaum homoseksual, kaum miskin kota, kaum cacat dan kaum feminis. Kedua, minoritas-minoritas nasional, yakni kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk memerintah sendiri. Ketiga, kelompok-kelompok etnis meliputi para imigran yang meninggalkan komunitas nasionalnya masuk ke dalam masyarakat

lain. Ketiga subyek kolektif ini memiliki tiga hak kolektif yakni hak-hak perwakilan khusus, hak-hak untuk memerintah sendiri dan hak-hak polietnis (Hardiman, 2011).

Menurut F Hari Budiman, tiga hak kelompok minoritas di atas muncul dari konteks sejarah pluralitas Barat yang berbeda dengan Indonesia. Tidak selalu cocok untuk penerapan di Indonesia terutama berkaitan dengan hak memerintah sendiri. Dalam pengalaman Barat (USA, Kanada, Belgia), politik multikulturalisme muncul dalam konteks masyarakat memiliki mental demokrasi dan sistem pemenuhan hak individu yang mapan. Di Indonesia, memberikan hak memerintah sendiri berhadapan dengan persoalan perspektif etnosentrisme yang bisa saja menjadi seakan-akan memperoleh legitimasi ketika politik multikulturalisme diterapkan. Lepasnya Timor-Timor dan beberapa gerakan separatis lainnya menjadi contoh tentang hal ini.

Dengan tidak membedakan kelompok atau golongan mana pun, multikulturalisme dianggap mampu mendorong sikap toleransi dan empati dalam bentuk apa pun (Supriyanto, 2009). Salah satu cara penting dalam mewujudkan multikulturalisme adalah dengan menjamin kebebasan berkreasi untuk memberdayakan masyarakat majemuk Indonesia (Supriyanto, 2009).

Ada beberapa hal yang bisa ditanyakan tentang multikulturalisme ini. Pertama, pandangan relativisme kultural dalam multikulturalisme. Pengakuan identitas bagi setiap kelompok apa pun nilainya mengandung pandangan relativisme kultural yang memandang baik-buruk suatu nilai hanya bisa dikembalikan pada pandangan dan konteks kelompok penganut nilai bersangkutan. Pandangan ini tidak mengakui adanya nilai universal yang ilahiah yang seharusnya menjadi pedoman rujukan dalam mengakui bahkan mengakomodasi ada tidaknya suatu nilai. Konsekuensinya, multikulturalisme berkewajiban mengakui dan mengakomodasi apa pun nilai dan kelompok yang berkembang meski bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam pendapat Kymlicka, misalnya, salah satu subyek kolektif dan nilai yang wajib dipenuhi hak identitasnya adalah kelompok atau gerakan baru seperti homoseksual, feminis dan apa pun yang baru termasuk paham-paham yang mengatasnamakan Islam namun menyimpang dari nilai dasar Islam.

Kedua, masalah jaminan kebebasan berekspresi sebagai bagian dalam politik multikulturalisme. Buku teks bisa saja menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi dalam konteks Indonesia harus dikembalikan kepada nilai-nilai Indonesia yang "Timur" dan berbeda dari Barat. Keyakinan ini membingungkan secara epistemologis. Di satu sisi, multikulturalisme berpijak pada keyakinan tidak adanya nilai tunggal dan absolut yang bisa dijadikan hakim bagi nilai-nilai budaya yang lain. Namun dalam hal ini, tiba-tiba saja mengandaikan adanya nilai Indonesia yang universal bagi setiap bentuk keragaman yang dikandungnya. Konsep kebenaran dalam epistemologi multikulturalisme berpijak pada kebudayaan manusia yang relatif. Sulit merumuskan batasan nilai yang tegas, yang bisa

berlaku bagi masyarakat Indonesia yang majemuk bahkan dalam suatu masyarakat tertutup sekalipun. Dalam masalah berekspresi, ekspresi apa pun harusnya diakui karena tidak adanya pengakuan terhadap suatu nilai yang absolut yang bisa menjadi kontrol ekspresi semua bentuk ekspresi.

Ketiga, ketidakmampuan multikulturalisme mengatasi benturan nilai yang berbeda. Prinsip kesetaraan digunakan multikulturalisme untuk menyikapi segala bentuk perbedaan. Kesetaraan yang diusung multikulturalisme lebih dari sekadar kesamaan hak dan perlakuan di depan hukum, tetapi juga kesamaan hak untuk diakui dan diberi ruang berekspresi apa pun nilai dan pandangan hidup yang dimilikinya. Apa yang bisa dilakukan multikulturalisme ketika terjadi benturan nilai antarkebudayaan?

Pengakuan identitas apa pun dalam multikulturalisme seakan-akan tidak mengakui fakta bahwa begitu banyak nilai yang bertentangan antara satu identitas dengan identitas lain, antara satu keyakinan dengan keyakinan lain, yang secara tak terbanding bersentuhan dan bersinggungan karena semakin hilangnya sekat pembatas antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain, satu negara-dengan negara lain. Sulit menemukan suatu masyarakat kebudayaan yang secara tertutup tidak bersinggungan dengan kebudayaan lain. Teknologi informasi saat ini bahkan memungkinkan budaya dan nilai dari negara nun jauh di Eropa sana bisa diakses dan dinikmati dengan mudah. Ketika konflik nilai terjadi, maka tak satupun dari kedua pihak yang berkonflik terlindungi dari "serangan" nilai masing-masing karena keduanya dilindungi oleh hak kolektif mereka untuk diakui.

Kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang berulang kali dilakukan di negara-negara Eropa bisa dijadikan contoh. Dalam kasus terbaru, yakni film *Innocence of Islam*, sutradara film bersangkutan tidak bisa dijerat hukum meski fakta bahwa film ini melukai dan menyinggung Ummat Islam jelas-jelas tampak. Upaya melindungi hak kelompok lain melalui politik multikulturalisme pada kenyataannya tidak bekerja dalam kasus penghinaan umat Islam ini. Upaya merayakan perbedaan dalam politik multikulturalisme gagal mengatasi masalah atau konflik yang ditimbulkannya karena tidak mengakui adanya nilai absolut, yang mengatasi nilai-nilai buatan manusia yang relatif.

IV. Kesimpulan

Kajian *Islamic worldview* pada buku teks antropologi SMA menemukan bahwa buku teks sebagai konten atau isi mengandung nilai dan doktrin yang perlu diwaspadai karena mengandung pengetahuan (*knowledge*) yang bertentangan dengan bangunan worldview Islam. Berdasarkan upaya kajian yang telah dilakukan terdapat beberapa simpulan yang bisa ditarik dalam studi ini.

Pertama, buku teks mengandung unsur *worldview* berupa *knowledge-structure*, berdasarkan konsep worldview Alparslan, yang mengandung muatan selular. Muatan selular ini diwakili oleh teori-teori antropologi yang dipaparkan dalam buku teks, yang berparadigma evolusionistis. Paradigma evolusionistis, bukan hanya dalam teori sejarah asal-usul manusia, juga berlaku pada teori-teori kemasyarakatan dengan analogi yang sama bahwa perkembangan manusia layaknya organisme biologis yang bersifat materialistis dan berkaitan dengan hukum adaptasi dan *survival of the fittest*.

Kedua, muatan buku teks antropologi meski tidak dapat dikatakan bertolak belakang dengan tujuan nasional, namun masih dinilai kurang menguatkan fungsinya sebagai media pengembangan pengetahuan sekaligus peningkatan iman dan takwa peserta didik. Kekurangan ini disebabkan karena muatan pengetahuan dalam buku teks sekadar kurang memberikan pengetahuan (*knowledge*) lain yang sesuai dan berdasarkan nilai-nilai agama peserta didik. Khusus bagi peserta didik muslim, teori-teori budaya dan kemasyarakatan, terutama konsep agama dan Tuhan, bisa membingungkan jika tidak bisa dikatakan menyedatkan pemahaman peserta didik tentang agam Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmed, A. S. (1994). *Ke Arah Antropologi Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- al-Attas, S. M. N. (2001). *Risalah untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- al-Attas, S. M. N. (2011). *Islam dan Sekularisme*. Bandung: PIMPIN.
- al-Faruqi, I. R. (1984). *Islamisasi Ilmu Pengetahuan*. Bandung: Pustaka.
- Arifin, M., & Syafi'i, A. (2003). *Kapita selekta pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, S. (2000). *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Rajagrafindo Persada.
- Hardiman, F. B. (2011). *Hak-hak asasi manusia: polemik dengan agama dan kebudayaan*. Kanisus.
- Koentjaraningrat. (1987). *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Kuhn, T. S. (2008). *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Bandung: Rosda.
- Manti, B. B., Husaini, A., Mujahidin, E., & Hafidhuddin, D. (2016). Konsep Pendidikan Modern Mahmud Yunus dan Kontribusinya Bagi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 151–183. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v5i2.589>
- Muslih, M., Zahri, M., & Surgana. (2004). *Filsafat ilmu: kajian atas asumsi dasar, paradigma dan kerangka teori ilmu pengetahuan*. Belukar.
- Saifuddin, A. F. (2005). *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Kencana: Prenada Media.
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Supriyanto. (2009). *Antropologi Kontekstual*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Surahman, E., Husaini, A., Mujahidin, E., & Saefuddin, D. (2014). Pengembangan Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Sekolah Menengah Atas Dalam

- Perspektif Islamisasi Ilmu Dan Pembinaan Akhlak Mulia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 114–121. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v3i2.565>
- Turgarini, D. (2012). Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah di Sekolah: Antara Kepentingan Kekuasaan dan Studi Kritis. Diambil dari www.fpips.com
- Yunus, R., Haryanto, B., & Abadi, C. (2006). *Teori Darwin Dalam Pandangan Sain dan Islam*. Gema Insani.